

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah (Handoko, 2012).

Dalam rangka menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber-sumber penghasilan dan

pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 (Dewi, 2002). Pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama pada daerah otonom. Kabupaten Ponorogo sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan keuangan daerah. besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah. salah satu jenis penerimaan daerah yaitu retribusi pasar di Kabupaten Ponorogo.

Menurut Irawan (2014) realisasi penerimaan retribusi pasar dari target yang ditentukan telah tercapai walaupun prosentase kenaikannya mengalami penurunan, sedangkan kontribusi Retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo ditahun 2011-2013 adalah tidak efektif. Hal tersebut belum tentu sama dengan kondisi saat ini, maka perlu adanya analisis pada tahun-tahun terakhir.

Siahaan (2013) Menyatakan Bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil penelitian Handoko (2012) memberikan bukti, Perkembangan retribusi pasar daerah di Kabupaten Pematang selama periode tahun 2007-2011, yaitu: Realisasi penerimaan retribusi pasar daerah selalu mencapai target yang ditetapkan,

dengan rata-rata pencapaian sebesar 103,65%. Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal (dinas) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kedua, faktor eksternal disebabkan dari segi masyarakat dan dari segi ekonomi. Efisiensi penerimaan retribusi pasar daerah dinyatakan berhasil dengan nilai rata-rata sebesar 4,75%. Pencapaian efisien mengindikasikan adanya keberhasilan kinerja dinas pengelolaan pasar daerah dalam memungut retribusi. Dimana biaya operasional yang digunakan untuk memungut retribusi tidak lebih besar 5% dari total penerimaan.

Retribusi pasar daerah sebagai sumber pembiayaan otda selama periode tahun 2007-2011 kontribusinya masih rendah/kecil sesuai kriteria ukur kontribusi. Rata-rata kontribusi sebesar 4,48%, kondisi tersebut dikarenakan belum dioptimalkannya sisi penerimaan dari retribusi pasar daerah. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Mosal (2013) mengenai kontribusi pajak parkir di kota Manado tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat disimpulkan kontribusinya sangat kurang.

Penelitian Laksmi dan Supadmi (2014) mengenai efektifitas pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Gianyar menunjukkan tingkat efektifitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan rasio efektifitas di Kabupaten Gianyar dari tahun 2009-2013 tergolong sangat efektif. Tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah dari tahun 2009 dan 2010 dikategorikan kurang baik, dari tahun 2011-2013 digolongkan

katagori sedang, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar tahun berikutnya lebih besar. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Putra Dkk (2014) mengenai efektifitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar menunjukkan Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata persentase sebesar 97,77%. Pada tahun terakhir (2012) penerimaan retribusi daerah dari jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha mengalami penurunan persentase efektifitas, sedangkan pada retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan persentase efektifitas. Berdasarkan hasil analisis, persentase efektifitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 dapat dikatakan sudah efektif.

Retribusi Pasar Sebagai salah satu sumber pendapatan reribusi daerah, pemerintah diharapkan dapat menggali potensi retribusi pasar semaksimal mungkin sebagai sumber keuangan penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar akan terjadi suatu perputaran uang yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Ponorogo (Dewi, 2002).

Halim (2009) bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa efektifitas

menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* (hasil) dengan *output* (target).

Menurut Halim (2004) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah:

1. Intensifikasi

Menurut Halim (2004) Intensifikasi merupakan suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

2. Ekstensifikasi

Menurut Halim (2004) Ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 – 2014.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kinerja penerimaan retribusi pasar di kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2014?
- b. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan retribusi pasar di kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2014?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Peneliti :

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ponorogo, dengan cara :

1. Mengetahui kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ponorogo
2. Mengetahui tingkat efektifitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ponorogo

### 1.3.2. Manfaat Peneliti

1. Manfaat Bagi Mahasiswa
  - a. Dapat membandingkan antara realita yang ada dilapangan dengan ilmu yang telah diperoleh diprogram S1
  - b. Memperluas dan meningkatkan kreativitas dan ketrampilan diri

## 2. Manfaat Bagi Instansi

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ponorogo
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Ponorogo dan Dinas INDAKOP dan UKM kabupaten Ponorogo serta Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ponorogo.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti yang Akan Datang

- a. Dapat digunakan sebagai referensi serta informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada Kabupaten Ponorogo.